

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Proses Lelang Dinilai Lambat

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.3

Edisi : Jum'at, 18 Mei 2018

Proses Lelang

Dinilai Lambat

DPDRD Khawatir Penyerapan Anggaran Rendah

Kembali Terulang Tahun Ini

BANDUNG, (PR).-

DPDRD Kota Bandung khawatir masalah penyerapan anggaran yang rendah kembali terulang di tahun ini. Berkaca pada proses lelang, belum terlihat perbaikan signifikan dalam perencanaan program-program Pemkot Bandung.

"Kami terus terang khawatir akan mengalami masalah serupa. Serapan anggaran rendah karena perencanaan program yang tidak matang. Lihat saja proses lelang sampai Mei ini yang masih lambat," tutur anggota Komisi A DPDRD Kota Bandung Ade Fahrurroji, Kamis (17/5/2018) siang.

Ade yang juga Ketua Panitia Khusus tentang Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017 mengungkapkan, serapan rendah anggaran bisa dilihat dari masih sedikitnya proyek-proyek besar yang masuk tahapan

lelang. Ujung-ujungnya nanti, banyak proyek fisik bakal dikebut pada akhir tahun.

Risikonya, kata Ade, banyaknya gagal lelang karena tidak cukup waktu lagi untuk melakukan lelang ulang. Kasus seperti ini banyak terjadi sepanjang tahun anggaran 2017 lalu. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam bulan-bulan ke depan, Ade khawatir kejadian bakal berulang di akhir tahun 2018 ini.

"Akan kita buktikan nanti di akhir tahun anggaran, berapa besaran silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) kita. Silpa yang besar karena ketidakserapan anggaran ini *kan* kerugian bagi masyarakat. Mestinya ada hasil pembangunan yang bisa dinikmati, tetapi gagal," katanya.

Ade secara khusus menyoroti buruknya perencanaan program oleh Pemkot. Poin ini juga yang disodorkan oleh Pansus LKPJ 2017. Dalam rekomendasinya, pansus meminta Pemkot untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem

perencanaan program.

"Jangan ada lagi program-program strategis yang gagal dikerjakan karena ketidakmatangan persiapan. Koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga mutlak perlu," ucapnya.

Sebelumnya, Pejabat Sementara Wali Kota Bandung Muhammad Solihin mengamini pentingnya perbaikan kinerja perencanaan program. Ia juga berharap agar tidak banyak lagi proyek yang gagal dilelangkan seperti tahun sebelumnya. Perbaikan perencanaan ini merupakan prioritas dalam bulan-bulan ini bersama upaya mencapai target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bandung Dadang Supriatna menyampaikan optimismenya terkait dengan kinerja lelang tahun anggaran 2018 ini. Menurut dia, Pemkot memiliki titik berangkat yang lebih baik dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 lalu. "Karena APBD 2018 sudah disahkan sejak Desember 2017 lalu. Jauh lebih cepat dari tahun se-

belumnya. Artinya kita memiliki waktu yang lebih luasa untuk mempersiapkan," tuturnya.

Potensi PAD

Ade Fahrurroji menyatakan, selain mendorong perbaikan sistem persiapan program, DPDRD juga meminta Pemkot Bandung mencermati belum optimalnya potensi pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun anggaran 2017, potensi yang belum tercapai tidaklah sedikit, yakni Rp 440 miliar.

"Kami mengapresiasi tercapainya target pajak, tetapi juga menantang Pemkot untuk bekerja lebih keras lagi. Ada ratusan miliar rupiah pendapatan yang mestinya bisa masuk dan bisa kita manfaatkan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Dua potensi PAD yang menjadi sorotan dewan adalah pajak reklame dan retribusi parkir. Mereka berharap segera ada perbaikan sistem sehingga lenyapnya potensi pendapatan tidak berulang. **(Tri Joko Her Riadi)*****